

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip Wawancara

Trankrip Wawancara Untuk Assesmen Change Management	
Nama	Ir Suyus Windayana, MApp.Sc
Jabatan	KaBid Pengembangan Sistem, Data dan Informasi Pertanahan
Waktu Wawancara	3 November 2008
1. Bagaimanakah sistem Komputerisasi Pelayanan Pertanahan yang sekarang berjalan? Bagaimana peranan Pusdatin di dalamnya? Sistem KKP yang saat ini digunakan ada 3 versi yaitu LOC 1, LOC 2A dan LOC 2B. Sistem ini sudah mampu memenuhi kebutuhan pelayanan pertanahan baik di Kanwil dan Kantah. Pusdatin membantu dalam mengelola sistem tersebut, baik aplikasi maupun datanya. Dan apabila timbul permasalahan dan tidak dapat diselesaikan oleh Administrator sistem di Kanwil dan Kantah maka akan diselesaikan oleh Pusdatin. Jumlah administrator sistem di Kanwil dan Kantah masing adalah dua orang.	
2. Apa yang mendasari diimplementasikan Komputerisasi Kantor Pertanahan ? Implementasi ini bertujuan untuk membangun sistem pelayanan pertanahan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi (Standard dan Terpadu); membangun database pertanahan nasional dan peningkatan kualitas informasi pertanahan; Pembangunan komunikasi on-line nasional - Kantor Pusat, Kanwil dan Kantah; Peningkatan kualitas SDM BPN RI di bidang Informasi Teknologi	

3. Seberapa besarkah potensi resiko selama proses pelaksanaan implementasi KKP ? Jika ada adakah langkah-langkah untuk antisipasi untuk itu ?

Sudah adakah *change management* dalam mengimplementasikan TIK ?

Dalam mengimplementasikan KKP, dampak dari implementasi tersebut belum semua diidentifikasi. Sehingga risiko dari implementasi seperti gangguan dan keterlambatan dalam implementasi belum diantisipasi atau dicari solusinya. Saat ini belum ada *change management* yang digunakan sebagai panduan dalam implementasi TIK, akan tetapi untuk ke depan akan dibuat *change mangement* tersebut.

4. Adakah kendala-kendala dalam implementasi KKP ?

Banyak sekali kendala yang muncul seperti dari sumber daya manusia yang terbatas baik dari segi jumlah maupun kualitas, data yang digunakan sebagai input dalam KKP, biaya implementasi untuk di Kanwil dan Kantah. Dan juga peraturan pemerintah yang berubah. Dengan perubahan peraturan ini maka KKP pun harus berubah, untuk menyesuaikan dengan peraturan yang baru.

5. Bagiamanakah bentuk penolakan dari pengguna terhadap sistem yang sudah diimplementasikan ? Bagaimana cara mengatasinya ?

Selama ini ada 2 bentuk penolakan yang bisa kami identifikasi yaitu keengganan user untuk menggunakan sistem karena mereka sudah terbiasa melakukan pekerjaan secara manual dan pimpinan yang membawahi mereka kurang peduli terhadap penggunaan TIK. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya penggunaan KKP di unit-unit. Untuk itu sosialisasi ke unit-unit dari tingkat pimpinan sampai operasional sangat dibutuhkan.

6. Sejauh manakah progres implementasi KKP yang sedang berjalan ? Dan rencana kedepan seperti apa ?

KKP saat ini mengalami perubahan yang ke tiga dan kedepan akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan. Dan akan dikembangkan KKP yang berbasis Web. Untuk implementasinya sampai tahun anggaran 2008 ini sudah 80 kanwil dan kantah yang menggunakan KKP.

7. Adakah dukungan dari eksekutif dalam implementasi KKP ? Dalam bentuk seperti apa ?

Dukungan pimpinan BPN terhadap implementasi TIK sangat besar, apalagi dalam pengembangan KKP menjadi layanan *mobile* LARASITA. Akhirnya mendapat penghargaan menjadi layanan terbaik di lingkungan pemerintah.

8. Seberapa tinggi tingkat ketergantungan unit lain yang menggunakan sistem terhadap Pusdatin ? Jika ada permasalahan dalam pemakaian KKP bagaimana penyelesaiannya ?

Unit-unit sangat tergantung pada Pusdatin. Setiap permasalahan yang muncul di unit lapor ke Pusdatin dan akan dilakukan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Tapi kendalanya adalah staf pusdatin sangat terbatas jumlahnya, sehingga untuk merespon setiap permasalahan dengan cepat mengalami kesulitan.

9. Apakah pengukuran keberhasilan dari implementasi KKP sudah dilakukan? Cara apa yang digunakan ?

Belum. Tapi kedepan hal itu akan dilakukan dimana tanggung jawab pengukuran keberhasilan implementasi TIK akan diberikan kepada Tim Pengelola TIK.

Dalam tugas Tim Pengelola TIK bisa anda lihat bahwa tugas Tim Pengelola TIK diantaranya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi TIK baik dikantor pusat, kantor wilayah dan kantor pertanahan.

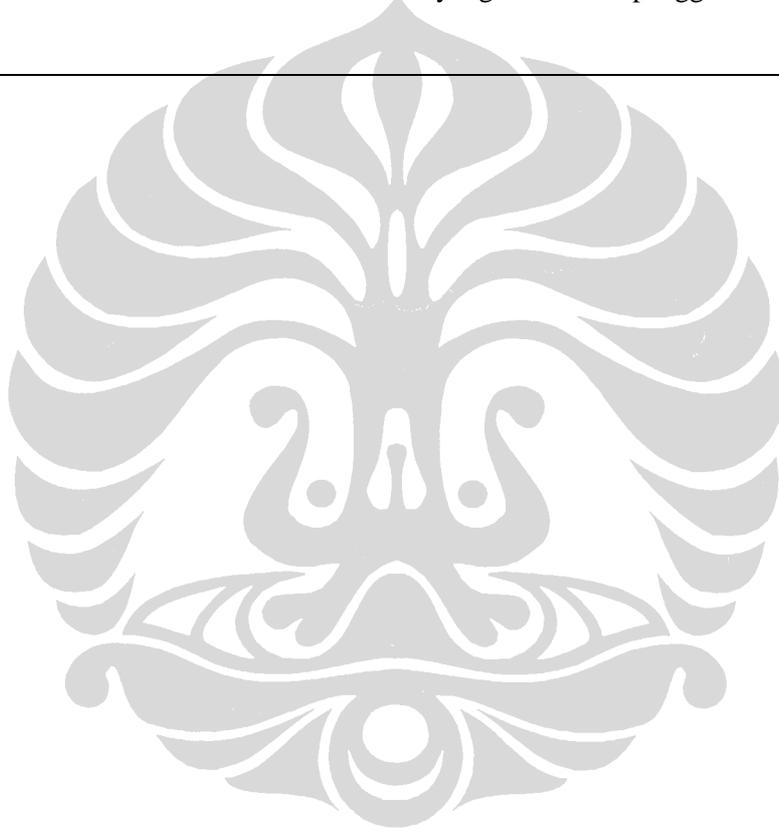
Trankrip Wawancara Untuk Assesment Change Management	
Nama	Ir. Perdananto Aribowo
Jabatan	KaBid Bimbingan dan Penerapan Komputerisasi SIMTANAS
Waktu Wawancara	3 Novemver 2008
<p>1. Apakah implementasi KKP sudah di informasikan jauh sebelum sistem tersebut digunakan ?</p> <p>Dalam implementasi KKP program sosialisai dilakukan setelah sistem tersebut akan digunakan di unit-unit. Dan biasanya program sosialisasi dilakukan untuk pimpinan-pimpinan di unit-unit tersebut. Sosialisasi belum mencapai seluruh staf operasional.</p>	
<p>2. Dukungan apa sajakah yang dibutuhkan pengguna dalam memanfaatkan KKP? Bagaimanakah Pusdatin memenuhi kebutuhan tersebut ?</p> <p>Untuk menggunakan KKP dukungan dari pimpinan di unit-unit sangat dibutuhkan untuk memacu mereka menggunakan sistem. Selain itu administrator teknis di unit juga sangat mendukung pemanfaatan KKP. Untuk memenuhi hal tersebut Pusdatin melakukan sosialisasi kepada pimpinan unit dan menyediakan administrator untuk di kanwil dan kantah.</p>	
<p>3. Adakah kendala teknologi yang menghambat jalannya implementasi KKP ?</p> <p>Kendala yang muncul dari teknologi akibat teknologinya yang tidak memadai juga akibat pengguna yang kemampuan di bidang TIK sangat terbatas.</p>	

4. Apakah pengguna mengetahui manfaat dengan diimplementasikannya KKP ?

Sejauh ini untuk pimpinan di beberapa kanwil dan kantah telah memahami manfaat dan tujuan diimplementasikannya KKP, tapi untuk pengguna yang lain kami belum mengevaluasi.

5. Fasilitas-fasilitas apa sajakah yang tersedia untuk mempermudah penggunaan KKP ?

Manual sistem dan administrator yang membantu pengguna memanfaatkan KKP.



Trankrip Wawancara Untuk Assesment Change Management	
Nama	Johar, SH. Yang lain tidak mau dicantumkan namanya
Jabatan	Admin Kantah Surabaya, Bogor dan Jakarta Barat
Waktu Wawancara	14 Oktober 2008, 4-5 November 2008
<p>1. Kegiatan apa sajakah yang dilakukan oleh Admin ?</p> <p>Dalam aktifitas sehari-hari selain mengerjakan tugas-tugas pemeliharaan sistem, kami juga mengerjakan tugas-tugas lain seperti membantu dalam tugas grafikal.</p>	
<p>2. Apakah anda mengetahui tujuan dari implementasi KKP ?</p> <p>Implementasi KKP bertujuan untuk mempermudah pekerjaan bagian pelayanan pertanahan.</p>	
<p>3. Kesulitan apakah yang muncul ketika pengguna memanfaatkan KKP ?</p> <p>Kesulitan yang muncul adalah sulitnya melalukan input data jika sistem mengalami masalah sepertimenjadi hambatan dalam penggunaan KKP adalah kompetensi SDM di bidang TIK yang kurang memadai. Biaya bisa juga menghambat penggunaan karena dengan terbatasnya dana akan menghambat proses pelatihan SDM.</p>	

4. **Masalah apa saja yang umum terjadi pada saat penggunaan aplikasi?**

- Ketika terdapat perubahan kebijakan (kasus yang ada terkait perubahan kewenangan SK: 6-2008), modifikasi flowchart pada aplikasi LOC dianggap kompleks sehingga Admin tidak berani melakukannya karena kekhawatiran ber-*impact* pada sistem keseluruhan
- Program hang ketika memproses data besar
 - sistem (LOC2b) mengharuskan pemrosesan berkas harus dilakukan langsung dalam satu waktu, padahal sistem ini tidak dapat melakukan integrasi data tekstual dan grafik secara parallel dengan proses integrasi di komputer lain.
 - Aplikasi Smallworld tidak dapat melakukan printout

5. **Bagaimana mekanisme pelaporan apabila terdapat masalah dengan aplikasi yang digunakan?**

Pengguna melapor ke admin. Bila admin tidak dapat menyelesaikan masalah, admin melapor langsung ke Pusdatin Jakarta.

6. **Sulitkah menjalankan aplikasi tersebut?**

Tidak sulit, namun penggunaan fitur KKP hanya dapat dipahami oleh petugas yang berkaitan saja. Tidak terdapat *rolling* petugas dalam penggunaan KKP.

7. **Apa harapan terhadap aplikasi online?**

Data bisa terupdate dengan *realtime*. Pengembangan tidak terbatas pada sarana, *device*, dan infrastruktur.